



LAPORAN HASIL PENELITIAN

JUDUL :
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMBANTU WALIKOTAMADIA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

OLEH :
TIM PENELITIAN

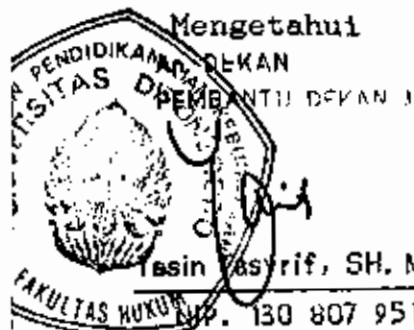
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1995

PROYEK OPERASI D
SITAS DIP
GAI

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul penelitian : Kedudukan dan Tanggung Jawab Pembantu Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Semarang
- b. Macam penelitian : Dasar
2. Kepala Proyek Penelitian :
 - a. Nama lengkap : Untung Dwi Hananto, SH ✓
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. Pangkat/Gol dan NIP : Penata Muda/ III B
131 763 897
 - d. Jabatan sekarang : Asisten Ahli Madya
 - e. Fakultas / Jurusan : Hukum / Hukum Tata Negara
 - f. Universitas : Diponegoro
 - g. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum Tata Negara
3. Jumlah Tim Peneliti : 4 (empat) orang
4. Lokasi Penelitian : Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 1.500.000 ,-
7. Dibiayai melalui proyek : Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Diponegoro Tahun 1994.

Semarang, Tgl. 22 Februari 1995



Mengetahui
Ketua Lembaga
Penelitian UNDIP

Prof. dr. R. Boedi Darmojo
NIP. 130 431 357

Kepala Proyek
Penelitian

Untung Dwi Hananto, SH.
NIP. 130 324 140

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	I
RINGKASAN DAN SUMMARY	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan/Perumusan masalah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pemerintahan Administratif.....	9
B. Pemerintahan Daerah Otonom.....	11
C. Pembantu Gubernur/Pembantu Walikota.....	18
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	22
A. Tujuan Penelitian	22
B. manfaat Penelitian.....	22
BAB IV METODE PENELITIAN	24
A. Metode Pendekatan.....	24
B. Metode Pengumpulan data.....	25
C. Jadwal Waktu Penelitian.....	26
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Keadaan umum Kota Dai II Semarang	27
B. Pengaturan Pembantu Walikota Semarang.....	32
C. Tugas dan Wewenang Pembantu Walikota Semarang.....	35
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
Kesimpulan.....	48
Saran-saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

R I N G K A S A N

Pembantu Walikotamadia Semarang adalah Lembaga atau pejabat pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadia Kepala daerah Tingkat II Semarang . Mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkungan wilayah kerjanya dan urusan Pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi.

Pengaturan mengenai pembantu Walikotamadia Semarang berubah sesuai dengan perubahan wilayah Kecamatan dalam wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang , yaitu dibagi menjadi 3 (tiga) bagian :

1. Pembantu Walikotamadia Semarang Wilayah I Genuk
2. Pembantu Walikotamadia Semarang Wilayah II Banyumanik
3. Pembantu Walikotamadia Semarang Wilayah III Ngaliyan

Pembantu Walikotamadia Semarang adalah jabatan atau lembaga yang sebelum dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1974 diberi nama "Wedana" atau "Pembantu/Penghubung antara Walikotamadia dengan Camat yang ada dibawahnya.

S U M M A R Y

The Deputy to Mayor of Semarang Regency is the institution or the center which has a responsibility to the Mayor of Semarang directly.

Its tasks is to coordinate, to control and to maintain the running of the general government development and society within its work area and other government in dealing with the application of deconcentration principle.

The Regulation concerning the deputy to Mayor Semarang regency can be changed in accordance with the change of sub district (Kecamatan) within the county of Semarang. It can be categorized into 3 areas i.e :

1. The Deputy to mayor of Semarang for I Genuk work area.
2. The Deputy to Mayor of Semarang for II Banyumanik Work area
3. The Deputy to Mayor of Semarang for III Ngalian work atea

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ridhoNya sehingga kami Tim Peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan judul Kedudukan dan Tanggung Jawab Pembantu Walikotaamadia Daerah Tingkat II Semarang dari hal tersebut Tim Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Rektor Universitas Diponegoro Semarang
- Ketua Lemabaga penelitian Univ.Diponegoro Semarang
- Dekan Fakultas Hukum UNDIP Semarang
- Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang beserta Staf
- Pembantu Walikotamadia Semarang Wilayah I, II dan III beserta staf
- Ketua Bappeda Jawa Tengah
- Kaditsospol Jawa Tengah

Serta semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu dalam pengantar ini, yang telah dengan tulus ikhlas membantu proses penyelesaian penelitian ini, baik berupa materiil maupun moril.

Motto kami sebagai tim peneliti adalah tak ada gading nan tak retak, demikian pula penelitian ini sebagai suatu karya ilmiah tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Selain permohonan maaf atas kekurangan tersebut, kritik dan saran membangun sangat diharapkan untuk lebih memperbaiki penelitian ini.

Lebih jauh dari segalanya di atas maka ada setitik harapan dipanjatkan Tim Peneliti, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Unuversitas Diponegoro.

Semarang Pebruari 1995

Tim Peneliti

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Dalam Undang Undang Dasar 1945 diatur mengenai Pemerintahan Daerah yaitu dalam pasal 18 yang menyebutkan

Pembagian daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Sebagai aturan pelaksanaan dari pasal tersebut yaitu tentang Pemerintahan di Daerah maka dikeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 , tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang No 18 tahun 1965 .

Dalam Undang-undang No.5 Tahun 1974 , BAB IV mengatur tentang Wilayah Administratif ,pasal 72 menyebutkan :

- (1). *Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah - wilayah Propinsi dan Ibukota Negara.*
- (2). *Wilayah Propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadia.*
- (3). *Wilayah Kabupaten dan Kotamadia dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.*
- (4). *Apabila dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, dalam wilayah Kabupaten dapat*

dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian didalam pasal 73 diatur mengenai Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati atau Pembantu Walikota madia,

Apabila dipandang perlu, Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati atau Pembantu walikota Madia yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Didalam suatu negara yang mempunyai wilayah yang luas, tidaklah mungkin seluruh urusan negara dapat diselesaikan oleh alat-alat perlengkapan yang hanya berkedudukan dipusat pemerintahan negar. Oleh karena itu untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah dibentuk atau diadakan alat pemerintahan / Lembaga Pemerintahan lokal yang ada di daerah tersebut. Alat Pemerintahan / Lembaga Pemerintahan yang ada di daerah ini dalam melaksanakan tugasnya ada yang berdasarkan asas Desentralisasi dan ada yang berdasarkan asas Dekonsentrasi atau juga bisa berdasarkan kedua asas tersebut secara bersamaan.

Asas Desentralisasi adalah Penyerahan urusan pemerintah atau Daerah Tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Sedangkan Otonomi Daerah adalah Wewenang dan Kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun diakui betapa pentingnya alat-alat perlengkapan pemerintahan yang berkedudukan di Pusat, tidak kalah pentingnya alat-alat perlengkapan pemerintah yang berkedudukan di daerah. Sebagian besar dari alat-alat perlengkapan negara adalah berupa alat-alat perlengkapan yang berkedudukan di daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan pula pentingnya peranan alat-alat perlengkapan pemerintahan tersebut, susunan dan tata cara bekerja dari alat-alat perlengkapan tersebut. Aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atau menentukan hal-hal tersebut, harus dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan tata susunan alat-alat perlengkapan yang berkedudukan di daerah yang berdaya guna dan merupakan suatu kebulatan sistem kerja alat-alat perlengkapan setempat bersama-sama dengan alat-alat perlengkapan ditempat lainnya dan dengan alat-alat perlengkapan yang berkedudukan di pusat.

Alat-alat perlengkapan pemerintahan lokal merupakan bagian dari alat-alat perlengkapan negara, oleh karena itu pula penyelenggaraan pemerintahan lokal harus tunduk pada asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Salah satu alat perlengkapan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem Pemerintahan di Indonesia namun sedikit sekali buku-buku atau tulisan-tulisan yang mengungkap tentang alat perlengkapan tersebut adalah Pembantu Bupati / Walikota madia Daerah Tingkat II.

Dalam penjelasan pasal 73 Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah dikatakan bahwa mengingat luasnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

umum, terutama dalam hal pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Daerah maka Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati dan Pembantu Walikota/madia dalam rangka Dekonsentrasi.

Mengingat kedudukan Gubernur adalah juga sebagai Kepala Daerah Tingkat I sebagai pelaksanaan Desentralisasi dan Bupati / Walikota madia juga sebagai Kepala Daerah Tingkat II sebagai pelaksanaan asas Desentralisasi maka dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan apakah pembantu Gubernur atau Pembantu Bupati / Walikota madia juga melakukan tugas-tugas dalam rangka membantu Gubernur, Bupati/Walikota madia sebagai Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No 18 Tahun 1965 dan Undang -undang No 5 Tahun 1974 ,diberlakukan Undang-undang No 6 Tahun 1959 tentang penyerahan pemerintahan umum. Undang-undang tersebut menghendaki adanya penghapusan Karesidenan dan Kawedanan. Kehendak penghapusan ini dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 22 Tahun 1963 , tentang penghapusan Karesidenan dan Kawedanan. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan yaitu tanggal 25 Oktober 1963. dan mulai saat ini, semua karesidenan dan Kawedanan atau wilayah pemerintahan yang setingkat, dengan nama apapun juga diseluruh wilayah Indonesia dinyatakan di hapus (pasal 1).

Dengan diberlakukannya Undang-undang No 18 tahun 1965, ternyata dasar pikiran untuk menghapus pemerintahan pamong praja masih tetap dianut dan dilaksanakan. Undang-undang ini hanya mengatur pokok-pokok pemerintahan Daerah

Otonom dan menetapkan adanya tiga tingkat Daerah Otonom yaitu :

- a. Propinsi dan / atau Kotaraya sebagai Daerah Otonom Tingkat I.
- b. Kabupaten dan / atau Kotamadya sebagai Daerah Otonom Tingkat II.
- c. Kecamatan dan / atau Kotapraja sebagai Daerah Otonom Tingkat III.

Sedangkan Karesidenan dan Kawedanan tetap berstatus seperti semula.

Untuk menjaga jangan sampai timbul keragu-raguan tentang status Karesideanan dan Kawedanan dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 1965 tentang Kedudukan dan Tugas para Pembantu /Penghubung Kepala Daerah Tingkat I / II . Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini pada prinsipnya ditegaskan kembali kedudukan residen dan wedana masing-masing sebagai pembantu /penghubung Kepala Daerah Tingkat I dan Pembantu Penghubung Kepala Daerah Tingkat II.

Khusus di Daerah Propinsi Jawa Tengah , maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 1965 tersebut dikeluarkanlah Instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No.4 Tahun 1966 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Kewenangan para Pembantu /Penghubung Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah dan para Pembantu/Penghubung Bupati/Walikota Madia Kepala Daerah dalam daerah Propinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian jelas bahwa di Daerah Propinsi Jawa Tengah para bekas Residen berkedudukan sebagai Pembantu/Penghubung gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedang Wedana berkedudukan sebagai Pembantu /Penghubung

bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Tetapi dikemudian hari,berhubung dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan perkembangan ketata pemerintahan daerah,maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.4 Tahun 1966 tersebut. Untuk keperluan tersebut dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah , No.Hukum G.23/3/15 tertanggal 31 Agustus 1967 yang menetapkan :

"Merubah Instruksi gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 1966 menjadi Instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 1966 (disempurnakan) "

Sehubungan dengan adanya perubahan / penyempurnaan tersebut ,maka dikeluarkanlah Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. Hukum G.23/3/16 tanggal 7 September 1967, perihal pelaksanaan instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No.4 tahun 1966 (disempurnakan), yang ditujukan kepada semua Pembantu/Penghubung Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah .

Isi Surat tersebut adalah sebagai berikut :

"Sebagaimana Saudara telah maklum maka berhubung dengan perubahan /perkembangan kehidupan masyarakat serta ketata pemerintahan daerah dipandang perlu untuk meninjau kembali instruksi kami No.4 tahun 1966 tentang Kedudukan,Fungsi,Tugas dan Kewenangan para Pembantu/Penghubung Gubernur/Bupati /Walikota kepala Daerah.

Sehubungan dengan perubahan tersebut yang salinan keputusannya bersama ini kami lampirkan maka kami mengharap perhatian saudara atas hal-hal sebagai berikut :

1. Kami sangat menghargai prakarsa para Pembantu / Penghubung Gubernur Kepala Daerah untuk mengadakan peninjauan daerah-daerah bawahan dan langsung membicarakan dari hati ke hati dengan rakyat, sudah barang tentu setelah terlebih dahulu memberitahukan maksud peninjauan itu kepada Bupati / Walikota, Madia Daerah Tingkat II selanjutnya mengadakan peninjauan bersama-sama dengan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II . Dalam pada itu pembicaraan dari hati ke hati juga dilakukan secara tidak resmi .
2. Seperti jelas dengan namanya, tugas utama Pembantu/Penghubung Gubernur Kepala Daerah adalah menjadi "Pembantu" dan "Penghubung" antara Gubernur Kepala Daerah dengan Bupati Kepala daerah dalam rangka tugas Gubernur selaku "Koordinator" antara jawatan-jawatan pemerintah Pusat dan Daerah dan "Pengawas" atas jalannya Pemerintah Daerah di wilayahnya atas dasar instruksi -instruksi / Petunjuk-petunjuk / Perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Gubernur.
3. Dalam melakukan pengerahan kegiatan dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah Daerah Saudara dapat bersikap dan bertindak korektif.

Demikian apa yang kami kemukakan diatas mutatis mutandis berlaku pula bagi para Pembantu/Penghubung Bupati/ Walikota Madia Kepala Daerah di seluruh Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Akhirnya kami mengharap perhatian Saudara untuk diindahkan seperlunya "

B. Pembatasan / Perumusan Masalah

Seperti telah dikemukakan diatas yaitu berpangkal pada pasal 72 dan pasal 73, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kedudukan dan tanggung jawab Pembantu walikota Madia daerah Tingkat II Semarang.

Agar dalam pembahasan tidak menyimpang dari judul tersebut, maka perlu diketahui perumusan permasalahan yang hendak dibahas, juga perlu adanya pembatasan masalah.

Adapun yang akan kami bahas dalam penelitian ini adalah masalah yang berkaitan dengan :

1. Bagaimana Kedudukan Pembantu Walikota madia Daerah Tingkat II Semarang menurut Undang-undang No 5 Tahun 1974
2. Tanggung jawab dan Tugas apa sajakah yang harus dikerjakan oleh Pembantu walikota madia Daerah Tingkat II Semarang.

Penelitian ini mengambil lokasi Di Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang, sehubungan dengan adanya perubahan wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang yang tadinya mempunyai 1 (satu) Pembentu Walikota Madia sekarang menjadi 3 (tiga) wilayah Pembantu walikota Madia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Administratif

Mengenai Pemerintahan Lokal menurut Joeniarto, SH dikatakan :

"dikenal adanya dua jenis Pemerintahan lokal ,yaitu pemerintahan lokal administratif (lokal state goverment) dan Pemerintahan Lokal yang mengurus Rumah tangganya sendiri (Lokal Autonomus Goverment)."

Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia kita mengenal dua jenis Pemerintahan lokal yaitu :

1. Pemerintahan lokal Administratif
2. Pemerintahan lokal yang mengurus rumah tangganya sendiri.

Berhubung Negara pada masa sekarang relatif luas, maka tidaklah mungkin penyelenggaraan segala urusan pemerintahan itu seluruhnya diserahkan atau dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan urusan-urusan pusat yang terdapat di daerah ,maka dibentuklah pemerintahan lokal administrasi dengan daerah administratifnya sebagai wakil dari pemerintah pusat.

Pemerintahan tersebut bersifat menyelenggarakan saja petunjuk atau perintah-perintah dari pusat, oleh karena itu sebenarnya hanya bersifat penyelenggaraan administrasi, petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah dari

Pemerintah Pusat .

Jadi Pemerintah Lokal Administratif merupakan bagian atau cabang dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Tingkat atasannya. Pemerintah Lokal administratif pusat terbentuk pada saat pemerintah pusat tidak lagi mampu mengurus urusan-urusannya yang tersebar di daerah dengan alat-alat perlengkapan yang hanya berkedudukan di pusat pemerintahan negara. Pemerintah jenis ini tidak boleh menyelenggarakan suatu urusan yang timbulnya dikarenakan atas inisiatif sendiri dalam arti berhak mengatur urusan sebagai urusan sendiri., meskipun dalam menjalankan tugasnya dapat saja diperlukan kebijaksanaan tetapi terbatas dalam arti menjalankan kebijaksanaan lebih lanjut dari pada perintah pemerintah pusat.

Hubungan antara Pemerintah Lokal Administratif dengan Pemerintah Pusat adalah hubungan menjalankan perintah atau hubungan atasan dan bawahan. Pemerintahannya dijalankan oleh seolah Kepala Pemerintahan yang merupakan pegawai Pemerintah Pusat dan ditempatkan di daerah untuk mengurus urusan-urusan pusat yang terdapat di daerah yang menjadi wewenangnya. Kepala Pemerintahan ini dibantu oleh pegawai pemerintahan pusat lainnya yang ditempatkan dibawah perintahnya.

Pemerintahan lokal administratif ini diselenggarakan dengan pembiayaan yang asalnya dari pusat, sedangkan pemerintahannya dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah.

Jadi dasar-dari Pemerintah lokal administratif adalah asas dekonsentrasi, yang berarti :

- a. Ditinjau dari segi pemberian wewenang, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat bawahan di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang-wewenang yang terdapat di daerah.
- b. Ditinjau dari pembentukan pemerintah lokal administratif, asas dekonsentrasi berarti asas yang akan membentuk pemerintahan lokal administratif di daerah untuk pemerintah pusat yang terdapat di daerah administratif yang bersangkutan.
- c. Ditinjau dari segi pembagian wilayah negara asas dekonsentrasi ialah asas yang akan membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah daripada pemerintahan lokal administratif.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dalam pasal satu huruf f mengenai pengertian Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasannya kepada pejabat-pejabat di daerah.

B. Pemerintahan Daerah Otonom

Pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ini mempunyai perbedaan yang prinsipil dengan jenis pemerintahan lokal administratif. Pemerintahan lokal ini bukan merupakan bagian atau cabang pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Walaupun di daerah-daerah itu dibentuk pemerintahan administratif

didalam penyelenggaraan kepentingan masyarakat , untuk memperoleh hasil yang sebaik-baik dalam penyelenggaraan urusan itu perlu diadakan penyesuaian dengan situasi atau keadaan dari masing-masing daerah. Terhadap urusan-urusan tersebut yang penyelenggaraannya tidak didasarkan atas garis-garis kebijaksanaan pusat, dapat dijadikan sebagai urusan Rumah Tangga Daerah.

Dengan meningkatnya kemajuan masyarakat di daerah-daerah tidak akan memuaskan apabila tidak mengikut sertakan tenaga-tenaga yang berada dalam masyarakat dari suatu daerah tertentu yang mengetahui kepentingan-kepentingan daerah itu . Untuk dapat menyelenggarakan Pemerintahan Negara yang sebaik-baiknya di tingkat-tingkat daerah dan untuk lebih memudahkan didalam penyesuaian dengan situasi dari pada masing-masing daerahnya , perlu dipisahkan beberapa urusan-urusan tertentu untuk penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Lokal yang mengurus urusan-urusan tersebut untuk diatur dan diselenggarakan atas kebijaksanaan sendiri sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Didalam suatu pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dapat pula dibentuk satuan tugas khusus, yang dikenal dengan nama "Dinas daerah " . Urusan-urusan Negara yang terdapat didaerah perlu diadakan perbedaan antara urusan-urusan yang tetap merupakan urusan pemerintah pusat sendiri atau oleh pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat atasnya.

Untuk menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan atau inisiatif sendiri, maka kepada pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri diberi pula sumber keuangan sendiri. Sebagian sumber keuangan negara diberikan kepada

pemerintah daerah. Dengan adanya sumber keuangan sendiri maka pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri mempunyai pendapatan-pendapatan keuangan sendiri. Terhadap pendapatan-pendapatan keuangan sendiri pemerintah ini diberikan wewenang untuk mengadakan pengelolaan sendiri sesuai dengan kebijaksanaan sendiri didalam penyelenggaraan urusannya.

Asas yang memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disebut asas. "Desentralisasi". Jadi dasar Pemerintahan Lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri ini adalah asas Desentralisasi, yang berarti :

- a. Ditinjau dari segi pembagian wilayah negara, - asas desentralisasi berarti asas yang akan membagi wilayah negara menjadi daerah besar dan daerah kecil yang mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Dari segi pembentukannya pemerintah daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, maka asas desentralisasi adalah asas yang akan membentuk pemerintahan pemerintahan di daerah yang akan diberi wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
- c. Ditinjau dari segi pemberian wewenang, maka asas desentralisasi ialah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah-pemerintahan di daerah untuk terhadap urusan-urusan tertentu diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Sedangkan Pengertian Desentralisasi menurut Undang-undang No.5 Tahun 1974 ,pasal i huruf b adalah : Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasannya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Adapun sebagai dasar pembagian daerah di Indonesia adalah Undang Undang Dasar 1945 Bab IV pasal 18. yang berbunyi :

Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan negara yang bersifat istimewa.

Sesuai dengan pembagian daerah menjadi daerah besar dan kecil disatu pihak dan daerah istimewa dilain .pihak, maka dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 disebutkan :

1. Oleh karena Indonesia itu suatu eenheidsstaat maka Indonesia tak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat staat juga.
Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang.
Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah, oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

II. Dalam Territoir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelbesturende Landschappen* dan *Volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut..

Dari keterangan seperti tersebut diatas maka Pemerintah Daerah adalah merupakan bagian dari kesatuan Negara Indonesia yang tujuannya adalah untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan.

Jadi Pemerintah Daerah bukan merupakan pemerintahan tersendiri dari Negara Indonesia. Oleh karena Indonesia suatu *Eenheidstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.

Dari Pasal 18 beserta penjelasannya dapat diketahui bahwa, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Menurut Ateng Syafrudin dalam bukunya *Pengaturan koordinasi Pemerintahan di daerah*, dikatakan bahwa:

Dasar Pembagian Daerah yang terdiri dari Daerah otonom sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi, dan wilayah administratif dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah. Sistem Pemerintahan yang

berdasarkan kedua asas tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejak Indonesia Merdeka sampai sekarang Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1945
2. Undang-undang No. 42 Tahun 1948
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1957
4. Penetapan Presiden RI No. 6 Tahun 1959
5. Undang-undang No. 18 Tahun 1965
6. Undang-undang No. 5 Tahun 1974

Dalam penelitian ini pembahasan dititik beratkan pada Undang-undang No 5 Tahun 1974.

Dalam Undang-undang No 5 Tahun 1974 ,tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dikenal adanya wilayah administratif yaitu lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah . Hal ini sebagai realisasi ketentuan dari penjelasan pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 tentang "Daerah belaka" yang merupakan perwujudan dari asas dekonsentrasi.

Sehubungan dengan Pemerintahan Lokal Administratif tersebut, Undang-undang No 5 Tahun 1974 mengatur tentang pembentukan dan pembagian , sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 :

- (1). Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam

wilayah - wilayah Propinsi dan Ibukota Negara.

- (2). Wilayah Propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadia.*
- (3). Wilayah Kabupaten dan Kotamadia dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.*
- (4). Apabila dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, dalam wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Kemudian didalam pasal 73 diatur mengenai Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati atau Pembantu Walikota madia,

Apabila dipandang perlu, Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati atau Pembantu walikota Madia yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Pasal 80 Undang-undang No.5 Tahun 1974, mengatakan :

Kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Sedangkan pasal 81 dari Undang-undang tersebut mengatakan :

Tugas dan Kewajiban Kepala Wilayah adala :

- a. Membina ketentraman dan ketertiban diwilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan pemerintah.*

- b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
- d. Membiayai dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Mengusahakan secara terus menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk serta mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
- f. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.

C. Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati/Kotamadia

Dengan dihapuskannya Karesidenan dan para bekas residen dijadikan Pembantu/Penghubung Gubernur Kepala Daerah, serta dihapuskannya Kawedanan dan para bekas wedana dijadikan pembantu/Penghubung Bupati/Walikota madia Kepala Daerah, timbullah jurang pemisah yang menyulitkan

hubungan serta garis komando antara Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat II dan antara Pemerintah daerah Tingkat II dengan Pemerintah Kecamatan dan juga dengan Pemerintah Desa. Oleh karena para bekas Residen dan para bekas wedana tidak berfungsi lagi sebagai Kepala Pemerintahan, sehingga mereka tidak dapat dan tidak berwenang mengambil keputusan- keputusan dan kebijaksanaan seperti semula.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka di Jawa Tengah kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. Hukum.G.23/1/4 Tanggal 18 Februari 1971, yang menetapkan merubah sebutan-sebutan sebagaimana ditentukan dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No 4 Tahun 1966 Junto Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No.Hukum. G.23/3/15 Tanggal 31 Agustus 1967, sebagai berikut :

1. Pembantu/Penghubung Gubernur Kepala Daerah menjadi Residen
2. Pembantu/Prnghubung Bupati/Walikota madia Kepala Daerah Menjadi Wedana
3. Ex Karesidenan menjadi Karesidenan
4. Ex Kawedanan menjadi Kawedanan.

Adapun pertimbangan atau alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. Hukum. G.23/1/4 tersebut adalah :

1. Bahwa sebutan-sebutan "Residen", "Wedana", "Karesidenan", "Kawedanan" ternyata lebih mudah diucapkan, lebih dapat diterima dan lebih hidup dari pada sebutan-sebutan "Pembantu/Penghubung Gubernur Kepala Daerah", "Pembantu/Penghubung Bupati Walikota madia Kepala Daerah", "Ex Karesidenan", dan "Ex Kawedanan", baik bagi para pejabat maupun rakyat banyak.
2. Bahwa disahkan serta digunakannya sebutan-sebutan "Residen", "Wedana", "Karesidenan", dan "Kawedanan" akan lebih memantapkan kedudukan para pejabat yang bersangkutan, hal mana akan meningkatkan efektifitas serta efisiensi kerja mereka dalam rangka mensukseskan tugas pokok pemerintah.

Demikian kemudian dalam praktek di Jawa Tengah dipergunakan kembali sebutan-sebutan : Residen, Wedana, Karesidenan, dan Kawedanan.

Secara yuridis Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. hukum. G.23/1/4 tersebut hanya merubah sebutan-sebutannya saja, sehingga tidak dapat diartikan menghidupkan kembali pemerintah pamong praja tingkat Karesidenan dan tingkat Kawedanan seperti pada tahun-tahun sebelum tahun 1963.

Jadi yang terjadi atau dilaksanakan barulah dipergunakan kembali sebutan-sebutan Residen, Wedana, Karesidenan dan Kawedanan. Dengan demikian sesungguhnya status Karesidenan dan Kawedanan masih seperti sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. Hukum. G.23/1/4, yaitu bukan suatu tingkat pemerintahan pamong praja, tetapi hanya

sebagai wilayah pemerintahan administrasi dari Propinsi atau Kabupaten/Kotamadia yang bersangkutan. Sedangkan Residen dan Wedana bukan berstatus sebagai Kepala Pemerintahan Administratif melainkan sebagai Pembantu/Penghubung Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Kotamadia Kepala Daerah.

Kemudian pada tanggal 23 Juli 1974 berlakulah Undang-undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dimana pasal 73 nya menetapkan bahwa : Apabila dipandang perlu, Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Pembantu Gubernur , Pembantu Bupati atau Pembantu Walikota Madia yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Pengaturan mengenai Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati/Walikota madia menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 masih perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh M.Solly Lubis,SH dalam bukunya "Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengennai Pemerintah Daerah" beliau mengatakan tentang perlu juga diketahui tentang Jabatan Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati dan Pembantu Walikota madia.

Prof.Amrah Muslimin,SH dalam bukunya Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah mengatakan bahwa : Undang-undang No.5 Tahun 1974 dengan tegas menyebut hanya ada dua tingkat Daerah otonom yaitu Daerah Tingkat I/Propinsi dan Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kotamadia.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang Pembantu Walikotamadia Semarang sehingga memberikan informasi yang luas tentang Lembaga tersebut
2. Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Pembantu Walikotamadia Semarang dalam sistim pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui sampai sejauh manakah tanggung jawab serta wewenang Pembantu Walikota Madia Semarang.
4. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tugas dan fungsi dari Pembantu Walikota madia Semarang.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bersifat akademis.

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan bahan dan gambaran dalam kenyataan mengenai bagaimana Kedudukan dan Tanggung Jawab Pembantu

Walikota Madia Semarang, yang dapat memberikan manfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.

2. Bersifat Praktis

Diharapkan dengan penulisan hasil penelitian ini dapat diperoleh data dan informasi yang terbaru yang dapat dipakai sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Tingkat II khususnya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Data ini dapat dipakai sebagai dasar untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai masalah yang berhubungan dengan Kedudukan dan Tanggung Jawab Pembantu Walikota Madia Semarang.

3. Bersifat Pribadi .

Diharapkan dengan hasil penelitian ini penulis akan bertambah pengetahuannya mengenai masalah masalah yang ada di desa, terutama masalah-masalah yang menyangkut mengenai Kedudukan dan Tanggung Jawab Pembantu Walikota Madia Semarang.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum, yang obyek penyelidikannya adalah bidang ilmu hukum yang meliputi : Hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dan hukum yang pernah berlaku, atau hukum yang akan berlaku. Atas dasar itulah maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Penelitian Normatif, yaitu suatu metode yang mengkaji norma-norma hukum mengenai Kedudukan dan Tanggung Jawab Pembantu Walikota Madia Semarang.
2. Metode Penelitian Historis, yaitu metode yang dipergunakan dalam rangka :
 - a. Mengkaji Norma-norma hukum yang pernah berlaku yang mengatur Pembantu Walikota atau yang berkaitan dengan itu.
 - b. Mengkaji sejarah pembentukan norma-norma hukum yang mengatur Pembantu Walikota Madia Semarang.

Mengingat bidang kajian dalam penelitian ini lebih dititik beratkan pada Ilmu Hukum dan Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan Historis, maka analisa yang digunakan adalah analisa Kualitatif. Dasar pertimbangan yang dipergunakan adalah : karena keberadaan norma hukum dan berlakunya kaidah hukum tidak didasarkan atas banyaknya aturan atau banyaknya orang yang melanggar kaidah hukum tersebut, melainkan ditentukan oleh kaidah hukum itu sendiri yang secara nyata

ditaati oleh warga masyarakat karena bersumber pada kaidah hukum sebelumnya atau kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.

Begitu pula jika dilihat dari prosedur pembentukan hukum tersebut telah memenuhi persyaratan baik formal maupun material. Formal dalam arti kaidah hukum tersebut dibuat melalui prosedur yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundangan, dan dibuat oleh orang atau lembaga yang berwenang untuk itu. Sedangkan Persyaratan Material dalam arti isi norma hukum tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Data primer diperoleh melalui :
Wawancara , yaitu mengadakan wawancara dengan pejabat yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.
2. Data Sekunder diperoleh melalui :
Studi Kepustakaan, yang berupa : Buku-buku, makalah, Laporan hasil penelitian, Peraturan perundangan dan sebagainya.
3. Alat Pengumpul data :
Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpul data yang berupa daftar pertanyaan.
4. Populasi Penelitian :
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pembantu

Walikota Mdia yang ada di Kota madia Semarang,
Sekretariat Wilayah Daerah Kotamadya Semarang (Bagian
hukum dan bagian pemerintahan).

5. Penyusunan data :

Data primer maupun data sekunder setelah terkumpul
kemudian disusun kembali secara urut dan teratur

6. Penyajian data :

Baik data primer maupun data sekunder setelah disusun
secara urut dan teratur, kemudia dianalisa secara
diskriptif Kualitatif dengan menggunakan pendekatan
deduktif dan induktif dalam menarik suatu kesimpulan,
kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian.

C. Jadwal waktu Penelitian.

1. Persiapan dan pengurusan ijin penelitian	30 hari
2. Penyusunan rencana penelitian	30 hari
4. Pengambilan data di lapangan	45 hari
5. Editing, tabulasi dan analisa	30 hari
5. Penyusunan laporan penelitian	45 hari

Jumlah	180 hari
--------	----------

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang

1. Letak Geografis

Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang terletak pada $109^{\circ} 50' - 110^{\circ} 35'$ garis bujur timur dan $06^{\circ} 50' - 07^{\circ} 10'$ garis lintang selatan, merupakan salah satu Daerah Tingkat II dari 35 Daerah Tingkat II yang berada di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Adapun batas-batasnya adalah : sebelah Utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Demak, Sebelah selatan Kabupaten Semarang, Sebelah barat Kabupaten Kendal.

Secara administratif pemerintahan Kotamadia Semarang terdiri dari 16 Kecamatan. sedangkan luas wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang tersebut adalah : 37.366,838 Ha. yang terdiri dari Tanah sawah seluas 4.658,585 Ha (12,47%), dan sisanya seluas 32.708,253 Ha (87,53%) merupakan tanah kering yang dipergunakan untuk : Pemukiman penduduk, Jalan, tegalan, Kolam dan sebagainya.

Penduduk Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 1991 berjumlah 1.151.536 jiwa, dengan tingkat kepadatan per Kilometer persegi 3.090 Jiwa, sedangkan banyaknya rumah tangga adalah 254.099, sehingga rata-rata tiap rumah tangga dihuni oleh 4,54 orang.

B. Pengaturan Kedudukan dan Tanggung jawab Pembantu Bupati/Walikota media di Jawa Tengah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 1974 pada tanggal 23 Juli 1974 , untuk seluruh wilayah Republik Indonesia , kemudian berdasar pada pasal 73 Undang-undang tersebut maka pada tanggal 14 Agustus 1975 dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah NO Pem. 675/75, tentang: " Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi
263/15

dan Tanggung Jawab Pembantu Gubernur Kepala Daerah dan Pembantu Bupati Kepala Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah".

Dalam pasal 7 Surat Keputusan Gubernur tersebut ditetapkan bahwa :

1. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur ini, maka:
 - a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 31 Agustus 1967 No.Hukum.G.23/3/15 Jo. tanggal 18 Februari 1971 No.Hukum.G.23/1/4 dan semua peraturan terdahulu yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - b. Sebutan Residen dan Wedana tidak dipergunakan lagi dan diganti menjadi Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati/ Walikota Media.
 - c. Sebutan Wilayah Karesidenan dan Wilayah Kawedanan

tidak dipergunakan lagi dan diganti menjadi Wilayah Kerja Pembantu Gubernur dan Wilayah Kerja Pembantu Bupati/Walikota Madia

2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 14 Agustus 1975.

Sedangkan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati / Walikota Madia di Jawa Tengah, menurut Surat Keputusan ini adalah :

Kedudukan

1. Pembantu Bupati/Walikota madia adalah pejabat dibidang Pemerintahan umum dalam rangka dekonsentrasi yang mempunyai wilayah kerja yang meliputi beberapa wilayah kecamatan.
2. Wilayah Kerja para Pembantu Bupati/Walikotamadia ditetapkan sama seperti wilayah kerja Wedana sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Pebruari 1971 No. Hukum.G.23/1/4.

Tugas Pokok

Tugas Pokok Pembantu Bupati/Walikotamadia adalah :

1. Membantu Bupati/Walikotamadia dalam kedudukannya sebagai Kepala wilayah menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi.

2. Menjalankan Tugas yang secara khusus dan sewaktu-waktu diberikan oleh Bupati/Walikota kepada.

Fungsi

Fungsi Pembantu Bupati/Walikota menurut Surat Keputusan ini adalah :

1. Koordinasi Pemerintahan terhadap wilayah Kecamatan dan Instansi Vertikal yang mempunyai wilayah kerja yang sama atau yang mempunyai wilayah kerja yang meliputi beberapa wilayah Kecamatan .
2. Pengawasan terhadap jalannya tugas-tugas dekonsentrasi oleh kepala-kepala wilayah - dalam wilayah kerjanya.
3. Memberikan Pendapat dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi.

Urusan-urusan

Dalam batas tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Pembantu Bupati/Walikota mempunyai urusan-urusan dibidang :

1. Ketentraman dan Ketertiban umum
2. Ketataprajaan khususnya soal khususnya soal penempatan Kepala Wilayah Kecamatan, Mantri polisi Pamong Praja, Kepala Kantor Kecamatan.
3. Kedesahan
4. Pertanian, termasuk soal-soal reboisasi/penghijauan.
5. Penanggulangan bencana alam

6. Kelancaran Pelaksanaan bimas
7. Kelancaran pelaksanaan proyek-proyek inpres
8. Kependudukan
9. Urusan-urusan lain yang secara khusus ditugaskan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya kepadanya.

Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Dalam menjalankan tugasnya, Pembantu Bupati/Walikota/Kotamadya bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota/Kotamadya yang bersangkutan.
2. Pembantu Bupati/Walikota/Kotamadya berwenang :
 - a. Memanggil para Kepala Wilayah Kecamatan dan Kepala Instansi Vertikal dalam wilayah kerjanya untuk mengadakan rapat-rapat koordinasi.
 - b. Meminta Laporan-laporan dari para Kepala Wilayah Kecamatan dan Kepala Instansi Vertikal dalam wilayah kerjanya, menganalisa laporan-laporan dan meneruskan dan meneruskannya dalam bentuk saran-saran kepada Bupati/Walikota/Kotamadya.

Sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur tersebut diatas maka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah No Pem.275/17 tertanggal 27 Agustus 1975 , perihal jabatan Pembantu Gubernur, dan jabatan Pembantu Bupati/Walikota/Kotamadya .

Dalam Surat Keputusan tersebut antara lain disebutkan tentang penyebutan jabatan dan penyebutan wilayah kerja. Untuk itu karena pada waktu dikeluarkannya Surat Keputusan ini Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang hanya mempunyai satu Pembantu bupati maka sebutannya adalah :

Sebutan jabatan : Pembantu Walikota Kepala Daerah
Tingkat II Semarang.

Sebutan wilayah kerja :

Wilayah Kerja Pembantu Walikota
Kepala Daerah Tingkat II Semarang untuk
Semarang.

B. Pengaturan Pembantu Walikota Daerah Tingkat II
Semarang.

Dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 1992
Kota Madya Semarang melakukan Penataan Kecamatan, yaitu yang
semula terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan :

1. Kecamatan Semarang Utara
2. Kecamatan Semarang Selatan
3. Kecamatan Semarang Tengah
4. Kecamatan Semarang Barat
5. Kecamatan Semarang Timur
6. Kecamatan Genuk
7. Kecamatan Tugu
8. Kecamatan Mijen
9. Kecamatan Gunung Pati

menjadi 16 (enam belas) Kecamatan , Yaitu ditambah dengan:

10. Kecamatan Gayamsari
11. Kecamatan Pedurungan
- 12. Kecamatan Candisari
13. Kecamatan Gajahmungkur
14. Kecamatan Tembalang

15. Kecamatan Banyumanik

16. Kecamatan Ngaliyan

sedangkan didalam Wilayah Kotamadya Semarang hanya ada 1 (satu) Pembantu Walikotamadya Semarang yaitu Pembantu Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang untuk Semarang.

Mengingat semakin meningkatnya Volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang ada dewasa ini diwilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang menyebabkan timbulnya hambatan dan kesulitan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap wilayah bawahan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan hasil guna dan daya guna dibidang pemerintahan dan pembangunan kiranya perlu ditata kembali wilayah kerja Pembantu Walikotamadia Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi daerah tingkat I Jawa Tengah, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1993, tentang "Penataan dan Pembentukan wilayah Kerja Pembantu Walikotamadia Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah". dengan memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 29 Oktober 1992, Nomor 146/032723 tentang usul pembentukan wilayah kerja Pembantu Walikotamadia Semarang.

Penataan dan Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Walikotamadia Semarang tersebut adalah sebagai berikut :

- (1). Pembantu Walikotamadia Semarang Wilayah I Genuk, yang meliputi:

1. Kecamatan Semarang Tengah
2. Kecamatan Semarang Utara
3. Kecamatan Semarang Timur
4. Kecamatan Gayamsari
5. Kecamatan Genuk
6. Kecamatan Pedurungan

Pusat Kedudukan Pembantu Walikotamadya Semarang Wilayah I Genuk , berada di Kecamatan Pedurungan.

- (2). Pembantu Walikota madia Semarang Wilayah II Banyumanik, yang meliputi :

1. Kecamatan Semarang Selatan
2. Kecamatan Candisari
3. Kecamatan Gajahmungkur
4. Kecamatan Tembalang
5. Kecamatan Banyumanik
6. Kecamatan Gunungpati

Pusat Kedudukan Pembantu Walikotamadia Semarang Wilayah II Banyumanik , berada di Kecamatan Banyumanik.

- (3). Pembantu Walikotamadia Wilayah III Ngaliyan, yang meliputi :

1. Kecamatan Semarang Barat
2. Kecamatan Mijen
3. Kecamatan Ngaliyan
4. Kecamatan Tugu

-Pusat kedudukan Pembantu Walikotamadia semarang Wilayah III Ngaliyan, berada di Kecamatan Ngaliyan.

Untuk melaksanakan Keputusan Mendagri No.22 Tahun 1993, dikeluarkan Surat Dirjen PUOD. 135/1334/PUOD, antara lain menyebutkan bahwa calon-calon Pembantu Walikotamadia harus memenuhi persyaratan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan departemen Dalam Negeri
- b. Pangkat sekurang-kurangnya III/d dan diprioritaskan yang berpendidikan APDN
- c. Berpengalaman dibidang pemerintahan, terutama yang pernah menduduki jabatan pemerintahan lainnya dilingkungan Departemen Dalam Negeri . Diprioritaskan bagi pengembangan karier untuk menduduki jenjang yang lebih tinggi.

C. Tugas dan Wewenang Pembantu Walikotamadya Semarang

Untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang serta meningkatkan fungsi dan peranan Pembantu Walikotamadia dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 1990 tentang Pedoman pelaksanaan Pendelegasian wewenang kepada Pembantu Walikotamadia , -maka dikeluarkan" Keputusan Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 137/437 Tahun 1993, tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang Kepada

Pembantu Walikotamadia Semarang di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang" ,sebagai penyempurnaan Keputusan Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang No 137/288/tahun 1992.

Keputusan Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang tersebut mengatur tentang :

1. Kedudukan , Tugas dan Fungsi

- Pembantu walikotamadia adalah pejabat pusat yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadia Kepala Daerah.
- Pembantu Walikotamadia mempunyai tugas membantu walikotamadia dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkungan wilayah kerjanya dan urusan pemerintah lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi.
- Pembantu Walikotamadia semarang mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan koordinasi , pengawasan dan pembinaan atas jalannya pemerintahan umum , pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pelaksanaan.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadia.

2. Kewajiban Wewenang dan Tanggung Jawab

- Pembantu Walikotamadia Semarang mempunyai kewajiban:

- a. Mengetahui segala permasalahan dibidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya dan berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar tidak berkembang;
- b. Melaporkan Kepada Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang mengenai segala kegiatan yang telah dilaksanakan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk penggunaan dana anggaran pembiayaan dari APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pembiayaan dari APBD Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang, Kepegawaian dan sebagainya;
- c. Memberikan informasi, penjelasan, keterangan kepada aparat pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang yang ditugasi oleh Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang di dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga dan aparat pemerintah wilayah .
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikotamadia Kepala daerah Tingkat II Semarang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibidang dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.

- Pembantu Walikotamadia berwenang untuk :
- a. Mengadakan Koordinasi secara rutin / berkesinambungan dengan para camat dan petugas instansi-instansi yang mempunyai wilayah kerja beberapa kecamatan
 - b. Melakukan pengawasan melekat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - c. Melakukan pembinaan dalam rangka terciptanya tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - d. Menetapkan dan memutuskan kebijaksanaan yang sifatnya pelaksanaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi, pengawasan dan pembinaan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam strategi kebijaksanaan yang telah digariskan .
 - e. Meminta Laporan dari para camat atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - f. Meminta laporan dari petugas instansi yang mempunyai wilayah kerja di beberapa kecamatan di bidang tugasnya, dalam rangka koordinasi.
 - g. Memberikan Rekomendasi kepada instansi, Lembaga dan perorangan yang akan menyelenggarakan kegiatan diwilayah kerjanya.

- Dalam melaksanakan tugas wewenang dan Kewajiban Pembantu Walikotamadia Semarang bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

3. Ruang lingkup Tugas yang didelegasiakan

1. Bidang Pemerintahan :

- a. Ketataprajaan khususnya masalah penempatan perangkat wilayah antara lain meliputi :
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang Dalam hal Pengangkatan, Pemberhentian dan alih Tugas Camat, Sekretaris Wilayah Kecamatan, Mantri Polisi Pamong praja, Perangkat Pemerintahan Wilayah Kecamatan, Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
- b. Penyelesaian permasalahan tanah untuk kepentingan pemerintah
- c. Pembinaan satuan polisi pamong praja
- d. Pembinaan pertahanan sipil (Hansip)
- e. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan
- f. Pembinaan Politik Dalam Negeri yang meliputi pembinaan umum dan masyarakat, Pembinaan perlindungan masyarakat dan ketentraman umum, Kesatuan bangsa dan ideologi negara dserta

pengamanan politik.

- g. Pelaksanaan pemilihan umum
- h. Pemasyarakatan P4
- i. Penyuluhan atas pelaksanaan Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- j. Pembinaan Perbatasan antar Kecamatan
- k. Membina dan mengarahkan pengembangan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang atau wilayah kerjanya.
- l. Pembinaan, pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk dan catatan sipil
- m. Mengikuti perkembangan dan menciptakan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang.
- n. Menciptakan keharmonisan hubungan kerja antar unsur pimpinan ditingkat kecamatan
- o. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan memadukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berbagai instansi diwilayah kerjanya.
- p. Membina dan memonitor pelaksanaan, pemasukan pajak dan retribusi.

- q. Sebagai Koordinator Intensifikasi PBB di wilayah kerjanya.
- r. Sebagai koordinator intensifikasi pajak-pajak negara
- s. Sebagai Koordinator pembebasan, pengadaan dan pencadangan di wilayah kerjanya untuk keperluan proyek pemerintah maupun proyek swasta.
- t. Sebagai Ketua tim penyuluhan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah dan Instruksi Mendagri No 18 Tahun 1989 tentang Juklak Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988 tersebut.
- u. Mengkoordinasikan pengawasan umum terhadap timbulnya pendudukan tanah secara liar
- v. Mengkoordinasikan pengawasan dan mencegah timbulnya bangunan-bangunan sebelum memiliki izin mendirikan Bangunan (IMB) dan perusahaan sebelum memiliki izin tempat usaha (ITU) dari Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang.
- w. Penyelenggara dan Penanggung jawab pelaksanaan lomba Kelurahan di wilayah Kerjanya
- x. Mengambil sumpah melantik dan menyaksikan serah terima jabatan Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan Kelurahan, Kepala Lingkungan Kelurahan.
- y. Melaksanakan Pemebinaan pencegahan serta pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan-

ketentuan hukum yang terdapat dalam pengesahan dan pengawasan musyawarah Badan Pelaksanaan Pendidikan (BP 3) di wilayah kerjanya.

- z. Membina dan Melaksanakan pengesahan musyawarah Kelurahan dalam bidang K 3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan)

2. Bidang Pembangunan

- a. Mengawasi dan membina pelaksanaan proyek inpres dan bantuan Presiden.
- b. Mengawasi dan membina pelaksanaan pembangunan Kelurahan dan pembangunan lainnya.
- c. Memantau pelaksanaan pembangunan fisik pemerintahan dan prasarana fisik perekonomian.
- d. Memantau perkembangan perindustrian, pertambangan, dan energi.
- e. Membina pengembangan perdagangan, perkoperasian dan pengembangan golongan ekonomi lemah termasuk pedagang kaki lima.
- f. Membina kepariwisataan
- g. Membina masyarakat Transmigrasi baik yang akan diberangkatkan ataupun yang sudah dimukimkan.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi terhadap barang-barang milik pemerintah.

1. Mengkoordinasikan permohonan program Bimas dan Inmas
- j. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan ijin terhadap pemberian tempat-tempat ibadah.
- k. Membina dan mengawasi Penyusunan daftar skala Prioritas (DSP) dari bawah (kelurahan dan Kecamatan)
- l. Bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan diwilayah Kecamatan Terpadu (PPWT) meliputi perencanaan dan pengawasannya
- m. Memantau hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas Teknis sebagai masukan dalam Program evaluasi dan Inventarisasi.
- n. Mengkoordinir perencanaan pembangunan Wilayah Kecamatan yang akan diusulkan kepada Pemerintah
- o. Mengkoordinir laporan-laporan hasil pelaksanaan pembangunan dari masing-masing kecamatan.

3. Bidang Kemasyarakatan

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana alam, wabah, dan penyakit menular, kurangpangan dan ketunaan sosial ;
- b. Pengembangan bidang ketenagakerjaan dan perburuhan;

- c. Pengembangan bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. Pengembangan bidang Pendidikan, Generasi muda, Kepramukaan dan Peningkatan Peranan Wanita;
- e. Pengembangan bidang Olah raga;
- f. Pembinaan Kependudukan Keluarga Berencana, dan Transmigrasi;
- g. Mengkoordinasikan PKK;
- h. Pembinaan Kelestarian Lingkungan hidup dan sumber daya alam serta pencegahan pencemaran lingkungan;
- i. Pengembangan Kehidupan Kerukunan Umat beragama;
- j. Pembinaan terhadap Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. Pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya termasuk RT dan RW;
- l. Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Sosial;
- m. Penyelenggara dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Hari Besar Nasional;
- n. Memberikan rekomendasi Pemindahan Kerangka Jenazah keluar daerah;
- o. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan

peningkatan pengamanan lingkungan;

- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim Satlak PBA;
- q. Mengkoordinasikan Pelaksanaan program Kebersihan Keindahan dan Ketertiban;
- r. Membantu Badan Pengawas Perusahaan Daerah dengan cara memberikan saran/pertimbangan maupun pendapat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat .

4. Bidang Umum

- a. Meningkatkan disiplin Pegawai Negeri;
- b. Membantu mengupayakan pengetahuan dan Ketrampilan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Dalam hal melaksanakan tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung jawab Pembantu Walikotamadia berwenang menetapkan Kebijakanaksanaan diwilayahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakanaksanaan Pemerintah yang telah ditetapkan.

Agar Keputusan Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang No.137/437 Tahun 1993 tanggal 21 juli 1993 yang tersebut diatas dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdayagunamaka - dikeluarkanlah " Keputusan Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 137/438 1993, tentang Hubungan Kerja Walikotamadia Kepala

Daerah Tingkat II Semarang dengan Pembantu walikotamadia ,
Camat dan Instansi yang lain " yang isinya adalah :

1. Bidang Umum

- a. Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Pembantu Walikotamadia Semarang berusaha melakukan segala upaya agar tugas-tugas Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasilguna.
- b. Unit-unit organisasi dalam kantor Pembantu Walikotamadia Semarang Dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi
- c. Setiap usulan/surat dari camat yang diajukan kepada Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang melalui Pembantu Walikotamadia , demikian pula perintah/surat dari Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang KCamat dilakukan melalui Pembantu Walikotamadia. Daerah Tingkat II Semarang dapat memberikan perintah langsung kepada camat dengan memberi tembusan kepada Pembantu Walikotamadia.
- d. Dalam hal diselenggarakan upacara dalam rangka kegiatan pemerintah di wilayah kerja Pembantu Walikotamadia yang dihadiri oleh pejabat Kotamadia yang tingkat jabatannya dibawah Sekretaris Wilayah Daerah/Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang , maka Pembantu walikotamadia ditetapkan sebagai pejabat yang mewakili Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

- e. Kedudukan protokoler Pembantu Walikotamadia adalah Pejabat sipil tertinggi diwilayah kerjanya.

2. Hubungan Kerja Pembantu Walikotamadia dengan :

- a. Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang adalah dibawah dan bertanggung jawab langsung ;
- b. DPRD Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang adalah hubungan Konsultatif;
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang adalah Hubungan Fungsional;
- d. Staf dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang adalah hubungan Fungsional;
- e. Camat dilingkungan kerjanya adalah hubungan koordinatif;
- f. Instansi-instansi dalam wilayah kerjanya adalah hubungan koordinasi

Dari isi peraturan-peraturan tersebut diatas ternyata Kedudukan dan Tanggung jawab Pembantu Walikotamadia Semarang sangat penting berhubung tugas dan fungsi walikotamadia Daerah Tingkat II Semarang semakin kompleks sehubungan dengan perkembangan Kota Semarang itu sendiri, dimana Semarang adalah ditunjuk Sebagai Ibukota Jawa Tengah.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang diuraikan dalam Bab IV tersebut diatas , maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Pembantu Walikotamadia Semarang berdasarkan Peraturan terbaru sekarang dibagi menjadi Tiga wilayah yang semula hanya satu wilayah.
2. Pembantu Walikotamadya Semarang mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah Pusat yang berada dibawah dan Bertanggung Jawab langsung kepada Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang.
3. Pembantu Walikotamadia Daerah Tingkat II Semarang adalah sebagai kelanjutan Lembaga alat Perlengkapan Negara yang namanya Wedana (sebelum diberlakukan UU No 5 Tahun 1974)
4. Pembantu Walikotamadia Semarang adalah sebagai pejabat yang mengkoordinasikan tugas-tugas Camat yang berada dalam wilayah kerjanya.
5. Tugas dan Fungsi Yang menjadi Tanggung Jawab Pembantu Walikotamadia Daerah sangat besar sekali dikarenakan Tugas dan Fungsi yang menjadi tanggung Jawab walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang Juga besar berhubung Kompleknya permasalahan yang ada dalam Kota Semarang.

6. Pembantu Walikotamadya Daerah Tingkat II Semarang adalah mempunyai kewenangan membantu tugas Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II dalam lingkup penyelenggaraan tugas berdasarkan atas asas Dekonsentrasi

B. Saran-saran

1. Bahwa agar tidak terjadi kejumuhan dalam pelaksanaan tugas Pembantu walikotamadia dengan Aparat lain yang berada dalam lingkungan Kotamadia daerah Tingkat II Semarang perlu dilaksanakana hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara satu dengan lainnya.
2. Sehubungan dengan Peraturan yang mengatur tentang Pembantu Walikotamadia relatif baru maka perlu pemasyarakatan dari peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amrah Muslimin, Prof., SH., Aspek-aspek Hukum Otonomi daerah
Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Bayu Surianingrat, Drs., Pamong Praja dan Kepala
Wilayah/daerah, Aksara Baru, Jakarta, 1980.

Bayu Surianingrat, Drs., Desentralisasi dan Dekonsentrasi
Pemerintahan di Indonesia, suatu analisa, Dewa Ruci
Press, 1988.

Joeniarto, SH., Pemerintahan Lokal Yayasan Badan Penerbit
Gajah Mada, Yogyakarta, 1976

Joeniarto, SH., Perkembangan Pemerintahan Lokal,
Alumni, Bandung, 1976

kuntana Magnar, SH., Pokok-pokok Daerah Otonom dan Wilayah
Administratif, Armico, Bandung

Solly Lubis, M, SH., Pergeseran Garis Politik Perundang-
undangan mengenai Pemerintah Daerah, Alumni, Bandung,
1978.

Soehino, SH., Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty,
Yogyakarta, 1983

..... Undang-Undang No 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Anaka Ilmu,
Semarang, 1983

Ronny Hanitijo Soemitro, SH., Metodologi Penelitian Hukum
dan Jurimetri Ghalia Indonesia, 1990